

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai struktur corporate governance terhadap manajemen laba telah banyak dibahas Nasution dan Setiawan (2007) menguji mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan di Indonesia. Sampel diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2000-2004. Manajemen laba diprosikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus Beaver dan Engel (1996) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Ujiantho dan Bambang (2007) meneliti mengenai mekanisme corporate governance, manajemen laba, dan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2002-2004. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba itu sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Darmawati (2003) mengenai corporate governance dengan menggunakan variabel kualitas hubungan perusahaan dengan stakeholders, menyatakan ada hubungan yang negatif dengan praktik manajemen laba itu sendiri. Chen et. al. (2005) meneliti corporate governance dengan menggunakan alat regresi berganda dan menggunakan variabel independen kualitas audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran auditor dan spesialisasi industri auditor, serta ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan leverage berhubungan negatif terhadap manajemen laba.

Winanada (2009) meneliti analisis pengaruh penerapan good corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan, variabel independen yang digunakan adalah corporate governance, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan, menyatakan bahwa penerapan good corporate governance, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berhubungan positif terhadap kinerja perusahaan. Secara sistematis hasil penelitian ini dapat disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 1: Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian Dan Alat Uji	Hasil Penelitian
1.	Nasution dan Setiawan (2007)	Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan. Alat Uji: Regresi Berganda	1. Komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
2.	Ujiantho dan Bambang (2007)	Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris. Alat Uji: Regresi Sederhana.	1. Kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 3. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	Deni Darmawati (2003)	Mekanisme GCG (pelaksanaan RUPS, kualitas dewan komisaris, kualitas komite audit, kualitas hubungan stakeholders, transparansi dan akuntabilitas, kepemilikan saham oleh investor institusional). Alat Uji: Regresi Linier	Hanya satu variable dalam Mekanisme (Good Corporate Governance) GCG, yaitu kualitas hubungan perusahaan dengan stakeholders yang berhubungan negatif dengan praktik manajemen laba.

		Berganda.	
4.	Chen et. al. (2005)	Audit quality (auditor size and industry specialization), and earnings management (measured by unexpected accruals), firm size, leverage. Alat Uji: Regresi Berganda.	1. Ukuran auditor dan spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Ukuran perusahaan berhubungan positif dengan manajemen laba. 3. Leverage berhubungan negatif dengan manajemen laba.
5.	Arsita Putri Winanda (2009)	Corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Alat Uji: Regresi Linier.	Penerapan good corporate governance, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berhubungan positif terhadap kinerja perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agency

Teori *Agency* merupakan masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer potensial dan manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Dalam hal ini pemegang saham mengharapkan manajer bekerja memaksimalkan kemakmuran bagi pemegang saham, akan tetapi manajer bisa saja bertindak sebaliknya yaitu bekerja untuk memaksimalkan kemakmurannya sendiri, sehingga terjadi konflik keagenan.

Agencytheory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemegang saham sebagai pihak *principal* mengadakan kontrak untuk memaksimalkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari *agent*, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *principal*.

Menurut Atmaja (2008: 12) teori *agency* merupakan “hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen/karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya”. Jensen dan Meckling (1976) dalam Isnanta (2008: 8), menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham dan wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Isnanta (2008: 10) kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu :

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Pendapat senada tentang teori *agency* dikemukakan oleh Harahap (2007: 546) bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisasi berbagai biaya *agency*. Idealnya apabila informasi bersifat simetris, maka teori ini tidak akan berlaku, akan tetapi pada kenyataannya informasi simetris sangat sulit terjadi, karena manajer berada didalam perusahaan yang mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan, sedangkan secara prinsipal perusahaan jarang memberikan informasi. Hal ini menyebabkan kontrak efisien sulit terjadi sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu dilandasi oleh asimetri informasi. Di samping itu, verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya.

2.2.2 *Teori Akuntansi Positif*

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* (PAT). Tiga hipotesis PAT yang dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman (1986) dalam Halim, dkk (2005) adalah:

2.2.2.1 *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada dibawah *bogey*, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada diatas *cap*, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan.

Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas *cap*. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara *bogey* dan *cap*, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.

2.2.2.2 *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

2.2.2.3 *The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)*

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media.

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman mengenai manajemen laba terkait dengan proses pemberian bonus kepada manajer, upaya tersebut dilakukan untuk menaikkan laba bersih akan terwujud. Selain itu adanya upaya perusahaan untuk meningkatkan laba bersih dengan mengurangi rasio hutang yang bertujuan agar beban yang terkait dengan hutang dapat diminimalkan, sehingga tujuan utama perusahaan dalam hal ini untuk memaksimalkan, keuntungan dapat terwujud.

2.2 *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kalangan pebisnis

mendefinisikan corporate governance sebagai tata kelola perusahaan. Corporate governance diartikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Sam'ani, 2008).

Setiawan (2008) menjelaskan manfaat dari corporate governance adalah entitas bisnis efisien, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi distorsi. Manfaat lain dari corporate governance adalah meningkatkan modal, rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta memberikan pengaruh positif terhadap saham (FCGI publication, 2006)

Beberapa konsep tentang corporate governance antara lain berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa corporate governance merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return.

2.3.1 *Dewan Direksi*

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal pengalokasian dana investor. Menurut Mackfudz (2003) Dewan direksi memiliki peran penting dalam perusahaan yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang.

2.3.2 *Dewan Komisaris Independen*

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dan pemegang saham, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dewan komisaris memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas

Menurut Dusti Amri (2011) komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan

Disadari bahwa menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Dengan demikian tanpa harus mempertentangkan, pengertian Komisaris Independen di dalam

UUPT sama dengan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan Independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Tugas Komisaris independen sebagaimana diatas antara lain berupa:

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

2.3.3 Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Sam'ani, 2008).

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

2.3.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang diklasifikasikan berdasarkan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Skala operasi (besar atau kecil) perusahaan dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan investasi. Tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total aktiva (Ferry dan Jones, 1979 dalam Panjaitan, 2004). Perusahaan besar umumnya memiliki total aktiva yang besar pula, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada perusahaan besar dengan total aktiva yang banyak akan lebih berani untuk menggunakan modal dari pinjaman (*debt financing*) dalam membelanjai seluruh aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar yang digunakan untuk perluasan usaha, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil ukurannya.

Ukuran (*size*) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil (Indriani, 2005).

Aktiva merupakan tolok ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya perusahaan besar mempunyai aktiva yang besar pula nilainya. Secara teoritis perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian (*certainty*) yang lebih besar daripada perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal tersebut dapat membantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi jika ia berinvestasi pada perusahaan itu (Yolana dan Martani, 2005).

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki

probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar tingkat leveragenya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil.

Francis (1986), Grubber dan Elton (1995) serta Fama dan French (1995) dalam Panjaitan, dkk (2004) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai nilai skala kecil cenderung kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar. Perusahaan kecil hanya memiliki faktor-faktor pendukung untuk memproduksi barang dengan jumlah terbatas. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala kecil mempunyai risiko yang lebih besar daripada perusahaan besar. Perusahaan yang mempunyai risiko yang besar biasanya menawarkan return yang besar untuk menarik investor.

2.4 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang.

Ada beberapa pengertian berkaitan dengan manajemen laba. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011) manajemen laba yaitu: “Mengatur laba *Earning Management* dalam kamus akuntansi dikenal dalam berbagai istilah: ada yang menyebut “*window dressing*” atau “*lipstick accounting*” untuk menciptakan laporan keuangan lebih cantik.” Menurut Copeland (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Halim dkk. (2005), manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar.

Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha para manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memnberikan informasi yang menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer. (Meutia, 2004). Menajemen laba dilakukan dengan memainkan komponen-komponen dalam laporan keuangan dan dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga mempermaikan besar kecilnya komponen akrualnya tidak disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan. Kesimpulan beberapa pengertian mengenai manajemen laba adalah intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang positif terhadap keberadaan perusahaan.

Dengan demikian, manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen laba yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan. Definisi earnings management menjadi dua, yaitu:

a. Definisi sempit

Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Earnings management dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya earnings.

b. Definisi luas

Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgment dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus.

c. Faktor-Faktor Manajemen laba

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011) ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek manajemen laba yaitu:

1. Manajemen Akrual (*accruals management*). Faktor ini biasanya berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*managers discretion*).
2. Penerapan Suatu Kebijakan Akuntansi yang Wajib. Faktor ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.
3. Perubahan Aktiva Secara Sukarela. Faktor ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada (*Generally Accepted Accounting Principles*).

d. Motivasi Manajemen Laba

Menurut Halim dkk. (2005) faktor-faktor yang memotivasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. Alasan Bonus (*bonus scheme*). Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.
2. Kontrak Hutang Jangka Panjang. Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan hutang, manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat

‘memindahkan’ laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami technical default (kegagalan dalam pelunasan hutang).

3. Motivasi Politis (political motivation). Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan labanya untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode kemakmuran tinggi.

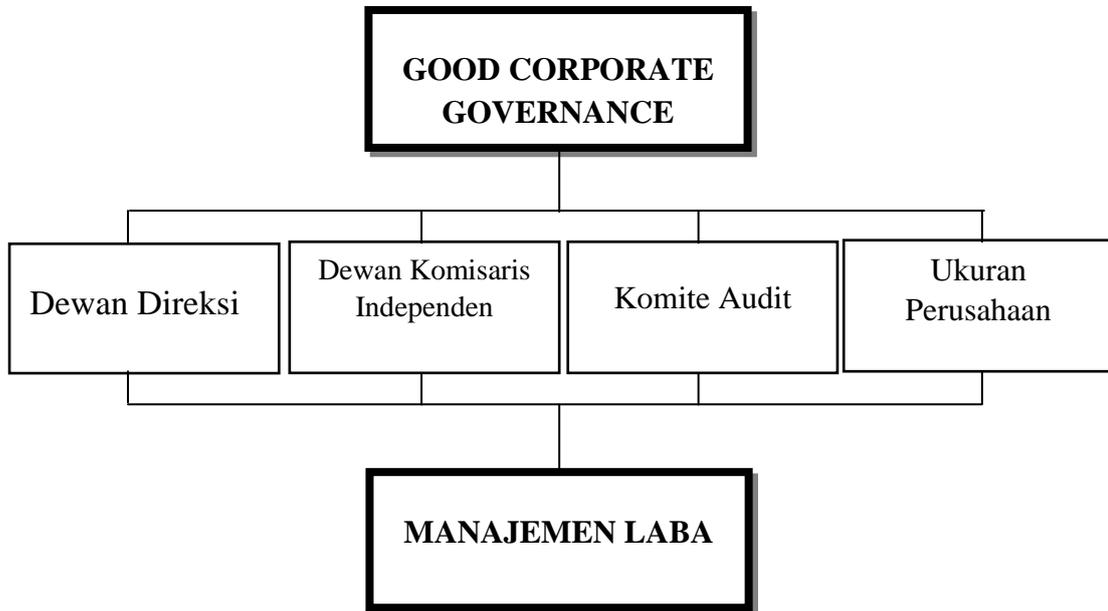
Motivasi Pajak (taxation motivation). Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini karena laba sering dijadikan landasan untuk mengambil keputusan, menyusun kontrak maupun penilaian kinerja suatu manajer. Pergantian CEO (Chief Executive Officer). Banyak motivasi yang timbul disekitar waktu penggantian CEO. Contohnya, CEO yang mendekati masa pensiun (tugas akhirnya) akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya.

IPO (*Initial Public Offering*). Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya dipasar modal belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi seperti laba bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan go public cenderung melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih tinggi atas sahamnya.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

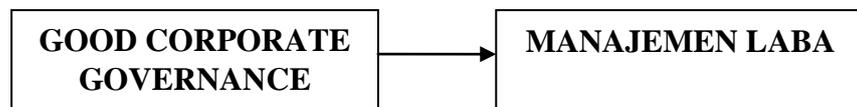
Kerangka pikir penelitian merupakan alur penelitian yang akan dilakukan, adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



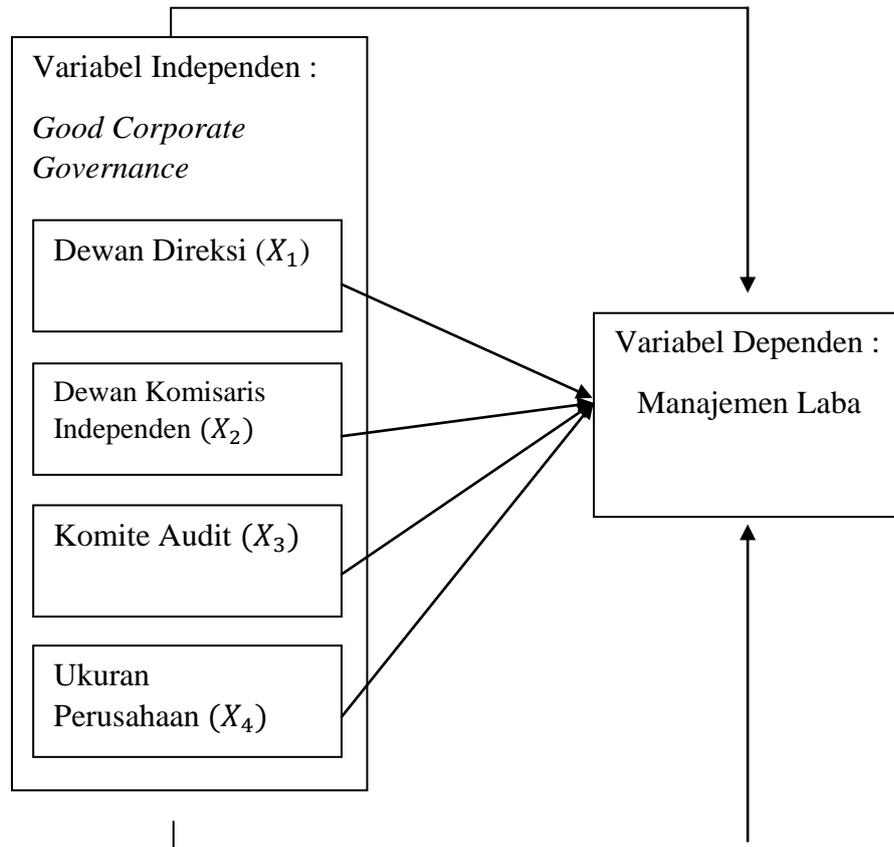
2.5.1 Model Konsep

Gambar 2: Model Konsep



2.5.2 Model Hipotesis

Gambar 3: Model Hipotesis



2.6 Model Hipotesis

- H_1 : Dewan Direksi (X_1) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (Y)
- H_2 : Dewan Komisaris Independen (X_2) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (Y)
- H_3 : Komite Audit (X_3) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (Y)
- H_4 : Ukuran Perusahaan (X_4) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (Y)